



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : KHAIRIL ANWAR
NIK : 6171061001830001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
Sub Unit Kerja : PENGADILAN NEGERI SANGGAU
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Jenis Laporan : Periodik - 2023
Tanggal Kirim : 8 Januari 2024

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

I. DATA PRIBADI

- Nama : **KHAIRIL ANWAR**
- Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
- NHK : **880872**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 202.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
- Tanah Seluas 200 m2 di KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 124.500.000

- MOBIL, TOYOTA CALYA 1.2 G M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
- MOTOR, HONDA ACF1L21B06/SOLO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
- MOTOR, KAWASAKI ATHLETE AX125 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 204.109

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 336.954.109

III. HUTANG Rp. 1.031.944.975

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. -694.990.866

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.